

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Gereja**

Dalam buku Sejarah Gereja Umum (Jonar.S: 2014:3-4) kata Gereja berasal dari bahasa Yunani yakni *kuriakon* atau *kuriakos* yang berarti “milik Tuhan” sedangkan dalam bahasa Inggris adalah “*church*” yang berarti gereja. Istilah ini dipakai oleh orang-orang Yunani untuk merujuk pada tempat ibadah. Jadi istilah gereja berarti “tempat ibadah” atau “rumah Tuhan”.

Melalui berbagai istilah tersebut dapat disimpulkan beberapa pengertian gereja adalah (Jonar.S: 2014:8) :

1. Gedung atau tempat beribadah Umat Kristen.
2. kelompok atau organisasi orang yang percaya kepada Yesus.
3. Persekutuan yang memberitakan kabar baik tentang Yesus.
4. Setiap anggota persekutuan saling menolong dan menguatkan.

Lahirnya gereja tidak lepas dari peran dan pengaruh ketiga Negara yaitu; Yunani, Yahudi dan Romawi, mengalami kebangkitan dan kegerakan yang dilakukan oleh Negara Belanda dan Jerman sampai akhirnya datang ke Indonesia untuk memberitakan injil dan penyebaran agama Kristen. Beberapa ahli sejarah mencatat bahwa selama periode 645-1500 di Indonesia sudah ada agama Kristen awalnya berada di “Fansur” yaitu di Pantai Barat Sumatera Utara lebih tepatnya Sibolga. (Jonar.S: 2014:10).

Ada beberapa macam aliran-aliran gereja berdasarkan sejarahnya yakni :

1. Gereja Mula-mula

2. Gereja Ortodoks
3. Gereja Katholik
4. Gereja Kristen (Protestan)
5. Gereja Kharismatik

Gereja Kristen Indonesia Sion dan Gereja Gerakan Pentakosta Eben Haezer termasuk kedalam aliran gereja Kharismatik karena menurut aliran gereja tersebut menyatakan suasana pengalaman ibadat yang baru dan lebih sesuai dengan kebutuhan dan perasaan manusia pada zamannya. (Jonar.S: 2014:360).

#### **B. Teori Relasi (*Linkage*) Politik**

Istilah relasi (*linkage*) adalah serangkaian hubungan atau koneksi yang biasanya berkonotasi dengan istilah “interaksi” antar elemen yang berhubungan atau berkorelasi satu sama lain. Proses hubungan ini diindikasikan dengan pola yang beragam seperti saling ketergantungan (*interdependency*), penetrasi, intervensi, integrasi, dan sebagainya. Bila merujuk lebih jauh, banyak studi politik yang menggunakan istilah “*linkage*” untuk menggambarkan inter-koneksi warga dengan proses pembuatan keputusan dalam proses kebijakan publik; hubungan antar warga negara yang aktif secara politik dengan para politisinya atau pejabat publiknya. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, istilah “*linkage*” juga banyak digunakan oleh studi politik yang berusaha menggambarkan peran aktor inter-mediari, terutama partai politik dalam mengembangkan “*linkage*”. (Chairul Fahmi,dkk. 2014:18-19).

Menurut K. Aarts *linkage* diartikan sebagai berbagai jenis ikatan antara warga negara, organisasi sosial dan sistem politik. Dengan demikian,

membicarakan *linkage* politik akan selalu terkait dengan 3 elemen dasar, yakni: (1) warga negara; (2) aktor/institusi intermediari; dan (3) *linkage* urusan publik. Tiga elemen itu yang melekat dalam diskusi soal *linkage* politik. Namun, dalam konteks demokrasi representasi tidaklah cukup *linkage* dipahami sebagaimana Lawson mengartikannya, yakni bahwa Pemerintah hanya butuh responsif terhadap opini publik. Lebih jauh, *linkage* politik dimaknai sebagai instrumen dimana elite politik bertindak sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan permintaan dari publik.

Guna memperjuangkan kebutuhan publik tersebut, elite politik dapat memakai beberapa sarana/instrumen. Sarana tersebut selama ini telah dilakukan oleh organisasi intermediari yang berfungsi mengagregasi dan merepresentasikan opini publik kepada pemerintah. Ketiga organisasi intermediari tersebut adalah:

(1) kelompok kepentingan dan kelompok penekan,

(2) gerakan sosial baru; dan

(3) partai politik . Dan partai politik merupakan aktor yang menonjol dalam demokrasi representasi.

Sementara itu, Sutoro Eko membagi relasi organisasi kemasyarakatan dengan partai politik menjadi tujuh bentuk, antara lain (Chairul Fahmi,dkk. 2014 :22-25). :

A. Relasi Partisipatif dianggap sebagai relasi yang paling ideal, dimana partai politik merupakan representasi dari berbagai organisasi masyarakat selain itu masyarakat juga dilibatkan dalam proses politik yang diusung oleh partai politik. Di sini terdapat koherensi antara gerakan sosial yang dimainkan oleh organisasi

masyarakat dengan gerakan politik yang dimainkan oleh partai politik untuk mencapai visi politik kolektif mereka.

- B. Relasi Klientalistik merupakan relasi yang terbentuk untuk mendapatkan keuntungan bersama. Dalam relasi ini, organisasi masyarakat menjadi mesin politik yang memperoleh keuntungan ekonomis dari partai politik, misalnya melalui proyek-proyek pemerintah yang dikelola oleh partai politik.
- C. Relasi Programatik adalah relasi dalam bentuk hubungan erat antara organisasi masyarakat dengan partai yang diikat dengan kesamaan dan komitmen ideologi maupun program. Dalam konteks ini relasi terbangun karena adanya kesamaan program yang dilakukan oleh partai politik dengan program yang dimiliki oleh sebuah organisasi masyarakat.
- D. Relasi Personal adalah relasi antara tokoh partai politik tertentu yang mempunyai pengaruh terhadap personal dari organisasi masyarakat, yang kemudian menyebabkan dukungan organisasi masyarakat kepada organisasi politik. Dalam hal ini organisasi masyarakat hadir sebagai pendukung setia partai politik karena diikat dengan “tali kharismatik” dari tokoh partai politik. Begitupun sebaliknya, relasi partai politik dengan organisasi masyarakat terbentuk karena adanya tokoh kharismatik pada organisasi masyarakat yang mana dapat menarik personal pada

partai politik untuk mengarahkan keberpihakan pada organisasi masyarakat tersebut

- E. Relasi Pasar merupakan relasi jangka pendek antara organisasi masyarakat dengan partai politik yang terbangun karena kesamaan isu yang diusung oleh partai politik dengan isu yang diperjuangkan oleh organisasi masyarakat. Dari sinilah terjadi pertemuan antara permintaan dan penawaran antara partai politik dengan organisasi masyarakat.
- F. Relasi Parokhial Bentuk ini hampir sama dengan relasi personal. Dalam hal ini, hubungan antara organisasi masyarakat dengan partai politik terjalin secara kuat karena kesamaan agama, suku, daerah, golongan, aliran, dll.
- G. Relasi Oposisional dalam relasi ini organisasi masyarakat tidak percaya pada partai politik dan cenderung menjadi anti terhadap partai politik. Sehingga relasi yang terbentuk adalah relasi yang bertentangan atau berseberangan. Istilah lain yang digunakan adalah menjadi oposan terhadap partai politik. Ini salah satu bentuk broken linkage antara organisasi masyarakat dengan partai politik.

Selain tipologi linkage politik yang diidentifikasi oleh Alistair Clark (2003) dari perspektif kajian partai politik, Kitschelt (2000) mendiskusikan *linkage* politik sebagai pola hubungan antara seorang politisi dengan warga negara sebagai konstituennya. Ia mengidentifikasi tiga jenis *linkage* yakni: klientelistik, pragmatik dan karismatik. Pertama, *linkage* klientelistik. Klientelisme

merupakan salah satu jenis 'pertukaran' antara konstituen elektoral dengan politisi sebagai agen dalam iklim demokratik. Sehingga, *linkage* klientelistik merupakan pola hubungan yang dibangun seorang politisi dengan warga yang diwakilinya melalui cara pemberian keuntungan material agar warga yang diwakilinya itu mau memberikan dukungan terhadapnya. Pola relasi keduanya kemudian menjadi patron (politisi) – klien (warga negara). Kedua, *linkage* pragmatik. *Linkage* model ini terbentuk karena seorang elite politik membangun pola relasi dengan konstituen berdasarkan program kebijakan yang menguntungkan semua warga negara, termasuk mereka yang tidak memilihnya. Ketiga, *linkage* karismatik. Dalam model *linkage* karismatik, pola relasi antara seorang elite politik dengan konstituennya dibangun berdasarkan pada karisma personal politisi yang bersangkutan. Sedangkan Rosenan membagi tiga tipe dasar proses linkage, yakni *penetrativ*, *reactive* dan *emulative*. (Chairul Fahmi, dkk. 2014:21-22).

### **C. Teori elite**

Terminology elite sebagaimana diungkapkan oleh Pareto dalam buku Haryanto (2017:2) menunjuk pada kelompok atau golongan yang ada disuatu masyarakat yang memiliki keunggulan atau superioritas apabila dibandingkan dengan kelompok atau golongan lainnya. Dalam setiap cabang kehidupan yang ada dimasyarakat akan memunculkan sebagian anggotanya sebagai elite.

Dengan demikian disuatu masyarakat akan ditemukan adanya elite dibidang ekonomi, politik, hukum, agama dan sebagainya. Mereka lah yang menduduki struktur puncak bidang kehidupan tersebut.

Pemaparan tersebut diperkuat oleh Selo Soemardjan dalam buku Haryanto

(2017:6), ia menyatakan pendapatnya, Selama suatu masyarakat masih dan beragam tunggal (*homogeneous*), maka polakepemimpinannya juga cenderung berbentuk tunggal dan meliputi semua bidang kehidupan masyarakat. Akan tetapi, apabila masyarakat itu bertambah anggotanya, lagipula apabila terjadi diversifikasi dalam bidang ekonomi, politik dan sosial, maka pola kepemimpinan yang beragam tunggal itu akan sukar sekali dilestarikan. Apabila struktur masyarakat menjadi beranekaragam (*heterogeneous*), maka dengan sendirinya pola kepemimpinan menjadi beraneka ragam. Di tiap-tiap bidang kehidupan masyarakat yang penting akan timbul, suatu golongan dengan suatu hirarki tersendiri, dimana ada suatu elite atau golongan kecil memegang peranan yang paling berpengaruh dibidangnya.

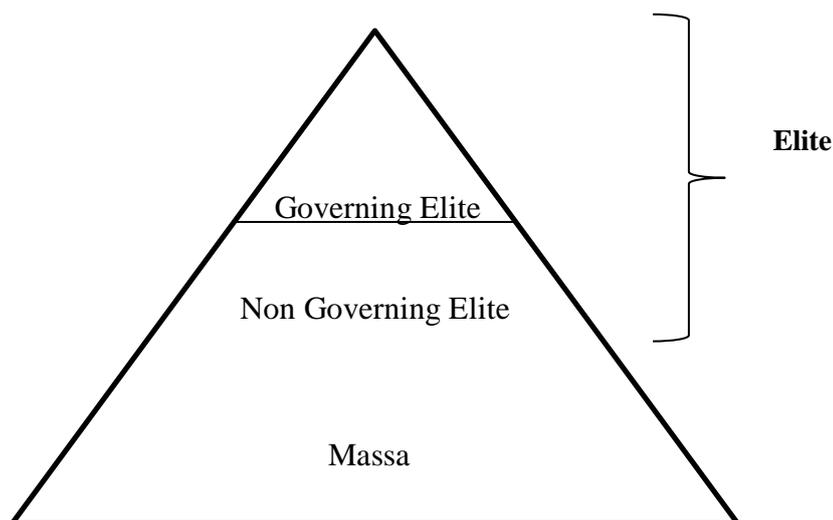
Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa terminologi elite meurujuk pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai keunggulan-keunggulan untuk menjalankan peran yang menonjol dan berpengaruh pada cabang kehidupan tertentu, seperti dalam bidang ekonomi atau politik. Akan tetapi ada kemungkinan seseorang atau kelompok orang dengan keunggulan-keunggulan yang dimilikinya juga mampu memainkan peran yang berpengaruh besar pada lebih dari satu cabang kehidupan.

Dalam buku Haryanto (2017:7-8) Pareto dan Mosca menyatakan bahwa di setiap masyarakat, baik masyarakat yang masih tradisional ataupun yang modern, pasti dapat diketemukan sekelompok kecil (minoritas) individu yang memerintah anggota masyarakat lainnya. Sekelompok kecil individu itu adalah lapisan elite yang sedang memerintah atau “*governing elite*” dan kelompok elite yang tidak

sedang memerintah atau “*non-governing elite*”. Mereka yang termasuk dalam kelompok elite yang sedang memerintah terdiri dari individu-individu yang menduduki jabatan-jabatan politis. Mereka yang termasuk dalam kelompok yang tidak sedang memerintah terdiri dari individu-individu yang tidak menduduki jabatan-jabatan politis, tetapi mempunyai kemampuan untuk memengaruhi secara langsung proses pembuatan kebijakan.

Pendapat tersebut, apabila dipaparkan dalam bentuk grafik menunjukkan sebuah piramida yang terbagi menjadi beberapa lapis. Piramida tersebut melukiskan masyarakat yang terbagi menjadi dua lapis, yakni anggota masyarakat yang termasuk dalam kelompok elite yang jumlahnya lebih sedikit apabila dibandingkan lapis lainnya yang terdiri dari anggota masyarakat pada umumnya yang tidak termasuk dalam kelompok elite (*non-elite*). Sementara itu, mereka yang termasuk dalam kelompok elite masih dipilah lagi menjadi dua, yakni mereka yang termasuk dalam kelompok elite yang sedang memerintah (*governing elite*) yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang termasuk dalam kelompok elite, tetapi tidak sedang memerintah (*non-governing elite*). Grafik berikut ini dapat lebih memperjelas hal tersebut :

**Gambar 1**  
**Piramida Masyarakat Menurut Pareto dan Mosca**



---

Melengkapi uraian yang dikemukakan Pareto ataupun Mosca tersebut, perlu disimak pendapat yang diajukan Guido Dorso. Dorso adalah seorang *political theorist* dari Italia yang mendasarkan pendapatnya pada pengamatan bahwa di masyarakat terdapat suatu dikotomi. Perbedaan dikotomi itu terdiri dari sekelompok anggota masyarakat yang melakukan peran sebagai kelas yang memerintah dan sekelompok anggota masyarakat yang lainnya dalam jumlah lebih besar yang berperan sebagai kelas yang diperintah. Kelas yang sedang memerintah, atau yang disebutnya dengan istilah “*the ruling class*” dinyatakan sebagai kelompok yang mempunyai kekuasaan.

Elite politik sendiri oleh Pareto dibagi menjadi dua bagian diantaranya elite politik lokal dan elite non politik non lokal, elite politik lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan politik (kekuasaan) di eksekutif dan legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum dan dipilih dalam proses politik yang demokratis ditingkat lokal. Mereka menduduki jabatan politik tinggi ditingkat lokal yang membuat dan menjalankan kebijakan politik. Elite politiknya seperti: Gubernur, Bupati, Walikota, Ketua DPRD, dan pimpinan-pimpinan partai politik. Sedangkan Elite non politik lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat. Elite non politik ini seperti; elite keagamaan, elite organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, profesi dan lain sebagainya. Perbedaan tipe elite lokal ini diharapkan selain dapat membedakan ruang lingkup mereka,

juga dapat memberikan penjelasan mengenai hubungan antar elite politik maupun elite masyarakat dalam proses Pemilihan Kepala Daerah di tingkat lokal. (Haryanto, 2017:7-8).

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu bertujuan menjelaskan hasil bacaan atau referensi yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Kajian pustaka bertujuan untuk memastikan bahwa pokok masalah yang akan diteliti belum pernah diteliti oleh peneliti lainnya. Dan pokok masalah yang akan diteliti mempunyai hubungan dengan sejumlah teori yang telah ada (Muljono: 2013).

Adapun penelitian pertama yang menjadi referensi adalah penelitian yang dilakukan oleh Pasrah Kristina (2015) dengan judul Gereja sebagai Agen Sosialisasi dan Mobilisasi Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Tapanuli Tengah Kecamatan Sibabangun Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sosialisasi politik. Hasil penelitian ini menjelaskan dan menguraikan beberapa faktor seperti faktor ekonomi, social dan personalitas yang menyebabkan pengurus gereja dipakai untuk memobilisasi suara jemaat.

Penelitian kedua yang menjadi referensi ialah penelitian yang dilakukan oleh Mega Purnamasari (2017) dengan judul Relasi Politik Pemerintah dengan Jemaat Gereja Paroki Hati Kudus Yesus dalam Dinamika Peraturan Daerah Tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius Di Kota Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan

fenomena. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori masyarakat sipil dan kebijakan publik. Hasil penelitian ini menjelaskan dan menguraikan bentuk relasi yang terjadi antara Pemerintah dengan Jemaat Gereja Paroki Hati Kudus Yesus mengenai Perda No 12 Tahun 2009 yang mengangkat nilai-nilai Syari'at Islam harus ditegakan di Kota Tasikmalaya.

Penelitian ketiga yang akan dijadikan referensi adalah penelitian yang dilakukan oleh Arrang Adiyaksa (2015) dengan judul Keterlibatan Pendeta Dalam Pemilu Legislatif Di Kabupaten Toraja Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori behavioralisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi dan kepentingan pendeta untuk terjun ke dalam politik praktis dikaitkan dengan tuntutan dari kelompok organisasi kegereja-an dan organisasi politik.

Nama Peneliti	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
---------------	-----------	-----------	------------------

**Tabel 4**  
**Matriks Penelitian Terdahulu**

<p><b>Pasrah Kristina.</b> 2015. (Universitas Sumatera Utara). <i>Gereja sebagai Agen Sosialisasi dan Mobilisasi Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Tapanuli Tengah Kecamatan Sibabangun Tahun 2014.</i></p>	<p>Menggunakan teori Mobilisasi Politik dan Sosialisasi Politik. Subjek Penelitian Gereja. Lokasi penelitian di Tapanuli Tengah Kecamatan Sibabangun.</p>	<p>Sama-sama bertema tentang Gereja dan Pemilu.</p>	<p>Mampu menjelaskan dan menguraikan beberapa faktor seperti faktor ekonomi, sosial dan personalitas yang menyebabkan pengurus gereja dipakai memobilisasi suara jemaat.</p>
<p><b>Mega Purnamasari.</b> 2017. (Universitas Siliwangi). <i>Relasi Politik Pemerintah dengan Jemaat Gereja Paroki Hati Kudus Yesus dalam Dinamika Peraturan Daerah Tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius Di Kota Tasikmalaya.</i></p>	<p>Subjek penelitian Jemaat Gereja Paroki Hati Kudus Yesus. Lokasi penelitian di Kota Tasikmalaya.</p>	<p>Sama-sama bertema tentang Gereja. Sama-sama berlokasi di Kota Tasikmalaya.</p>	<p>Mampu menjelaskan dan menguraikan bentuk relasi yang terjadi antara Pemerintah dengan Jemaat Gereja Paroki Hati Kudus Yesus mengenai Perda No 12 Tahun 2009 yang mengangkat nilai-nilai Syari'at Islam harus ditegakan</p>

			di Kota Tasikmalaya.
<b>Arrang Adiyaksa.</b> 2015. (Universitas Hasanuddin Makassar). <i>Keterlibatan Pendeta Dalam Pemilu Legislatif Di Kabupaten Toraja Utara.</i>	Menggunakan teori Behavioralisme. Subjek penelitian Pendeta. Lokasi penelitian di Kabupaten Toraja Utara.	Sama-sama bertema tentang Gereja dan pemilu.	Mampu menjelaskan, menguraikan motivasi dan kepentingan pendeta untuk terjun ke dalam politik praktis dikaitkan dengan tuntutan dari kelompok organisasi kegerejaan dan organisasi politik.

Sumber : dari masing-masing skripsi.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Pertautan politik yang dibangun oleh elite politik adalah sebuah strategi baik dari aktor elite politik maupun dari partainya. Beliau mempunyai team sukses yang mempunyai hubungan dengan pendeta, pengurus dan jemaat gereja. Sedangkan elite politik yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah Tjahja

Wandawa dari Partai Nasdem kandidat yang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD di Dapil 1 Kota Tasikmalaya Tahun 2019 yaitu di Kecamatan Cihideung, Tawang dan Bungursari.

Team sukses sebagian besar sudah mempunyai pegangan atau andalan gereja masing-masing, dan team sukses ini juga berhubungan baik dengan gereja tersebut. Sehingga Pendeta, Pengurus serta Jemaat sebagian mengenal para team sukses dan begitupun sebaliknya.

Dengan begitu team yang menjalankan misinya akan lebih mudah menarik dukungan para Pendeta yang nantinya akan berpengaruh terhadap para jemaat ataupun berhubungan langsung dengan Gereja Kristen Indonesia Sion dan Gereja Gerakan Pentakosta Eben Haezer oleh para team sukses.

Disamping itu, orientasi pertautan politik yang dibentuk dan dijalankan pun mempunyai kepentingan yaitu kepentingan untuk para gereja dan jemaat itu sendiri, karena dengan mempunyai hubungan, jemaat merasa bahwa adanya hak yang sama dalam menjalankan ibadah bagi setiap agama termasuk dalam hal perizinan dan persetujuan masyarakat sekitar ketika ada pembangunan atau apapun yang berkaitan dengan peribadatan Umat Kristiani. Dan selain itu, adanya perlindungan untuk Umat Kristiani di Kota Tasikmalaya dalam menjalankan peribadatan, sehingga tidak memunculkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh para umat beragama. Dengan begitu dukungan suara jemaat dari kedua gereja tersebut akan semakin kuat sehingga pertautan politik menjadi factor pendukung kemenangan Tjahja Wandawa dalam Pileg 2019 di Kota Tasikmalaya.

**Gambar 2**  
**Kerangka Pemikiran**

